

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah sebuah kegiatan yang meliputi mencari, membaca dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Di dalamnya bisa terdapat teori-teori terhadap judul tulisan atau makalah yang ingin dilakukan. Dalam hal ini serupa bahwa tinjauan pustaka ialah fungsi hipotesis dalam penelitian.

2.1.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

2.1.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan standar akuntansi pemerintahan melibatkan pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah yang sangat penting guna mencapai pengukuran kinerja yang lebih optimal. Hal ini juga bertujuan untuk mempermudah manajemen keuangan/aset dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Menurut Pasal 1 ayat 3 dari PP Nomor 71 Tahun 2010, dapat dijelaskan bahwa standar akuntansi pemerintah mencakup prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Standar akuntansi pemerintahan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), sebuah lembaga independen. Standar ini diungkapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan didasarkan pada kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini merupakan landasan untuk penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, kerangka konseptual ini

menjadi panduan bagi KSAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari solusi untuk situasi yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

Implementasi standar akuntansi pemerintahan menegaskan bahwa pemerintah diwajibkan menerapkan Sistem Aplikasi Perencanaan (SAP) yang berbasis akrual dengan tujuan memberikan manfaat yang lebih besar, tidak hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, melainkan juga untuk pengguna laporan keuangan dan pemeriksa keuangan pemerintah. Penggunaan SAP Berbasis Akrual harus dimulai pada penyusunan laporan keuangan sejak tahun anggaran 2010, atau paling telat empat tahun setelah periode tersebut.

2.1.1.2 Petunjuk Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, petunjuk standar akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. PSAP Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan struktur yang sistematis untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta semua transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan ini utamanya bertujuan untuk memberikan gambaran nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan operasional, melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi suatu entitas, serta membantu menetapkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna dalam mengevaluasi akuntabilitas

dan membuat keputusan. Penyajian laporan keuangan mengacu pada pengakuan transaksi/peristiwa yang terjadi dengan menerapkan basis akrual dan basis kas.

2. PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas

Laporan realisasi anggaran memberikan informasi terkait pencapaian pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan, yang kemudian dibandingkan dengan anggarannya. Tujuan utama dari laporan realisasi anggaran adalah menyajikan data yang berguna dalam memproyeksikan sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk membiayai kegiatan pemerintah pada periode berikutnya. Proses penyusunan laporan realisasi anggaran melibatkan penerapan akuntansi berbasis akrual dan pencatatan pendapatan berdasarkan prinsip bruto.

3. PSAP Nomor 03 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama suatu periode. Informasi tersebut dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitori. Proses penyajian laporan arus kas melibatkan penyusunan dan presentasi data arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menerapkan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasional.

4. PSAP Nomor 04 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan bertujuan agar dapat dimengerti oleh pembaca dengan cakupan yang melibatkan berbagai pihak, tidak hanya terbatas pada pembaca khusus atau manajemen entitas pelaporan. Penyajian catatan atas

laporan keuangan harus dilakukan secara terstruktur. Catatan tersebut mencakup penjelasan, daftar terinci, atau analisis terhadap nilai suatu pos yang terdapat dalam berbagai laporan keuangan, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penyajian catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk menyampaikan informasi yang lengkap mengenai penjelasan atas berbagai pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.

5. PSAP Nomor 05 Akuntansi Persediaan

Persediaan diakui ketika pemerintah memperoleh potensi manfaat ekonomi di masa depan dan memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal. Pengakuan persediaan terjadi pada saat penerimaan atau perubahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan. Proses pengakuan akuntansi persediaan melibatkan pencatatan dan pengakuan persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang dilakukan pada akhir periode akuntansi.

6. PSAP Nomor 06 Akuntansi Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat dianggap sebagai investasi jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Investasi tersebut memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa di masa depan yang dapat diperoleh oleh pemerintah.
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar dari investasi tersebut dapat diukur dengan memadai. Pengeluaran untuk investasi jangka pendek akan diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak akan dilaporkan sebagai belanja

dalam laporan realisasi anggaran. Sebaliknya, pengeluaran untuk mendapatkan investasi jangka panjang akan diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengakuan akuntansi investasi terjadi ketika kas yang telah dikeluarkan diakui sebagai investasi setelah dipastikan bahwa manfaat ekonomis potensial di masa depan dapat diperoleh, dan nilai perolehan investasi dapat diukur.

7. PSAP Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap

Pengklasifikasian dalam akuntansi aset tetap didasarkan pada kemiripan sifat yang terkait dengan kegiatan operasional suatu entitas. Aset tetap terbagi ke dalam kategori-kategori seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, dan konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset tetap dilakukan pada saat dimana manfaat ekonomi di masa depan dapat diperoleh dan nilai aset dapat diukur secara dapat diandalkan. Untuk diakui sebagai aset tetap, suatu entitas harus memenuhi sejumlah kriteria, yaitu bersifat berwujud, memberikan manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara dapat diandalkan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau digunakan dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan akuntansi aset tetap melibatkan pencatatan atau penilaian aset tetap dengan nilai perolehannya dan mengelompokkannya berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas.

8. PSAP Nomor 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Proyek konstruksi yang sedang dalam tahap pengerjaan melibatkan berbagai jenis aset, termasuk tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,

irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya, yang pembangunannya memerlukan waktu tertentu dan belum selesai. Suatu objek konstruksi yang sedang dalam proses pembangunan, atau dikenal sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), diakui sebagai KDP jika:

- a) Terdapat peluang besar bahwa manfaat ekonomis di masa mendatang terkait dengan aset tersebut akan diperoleh.
- b) Biaya perolehan dapat diukur dengan andal.
- c) Aset tersebut masih berada dalam tahap pengerjaan.

Dalam konteks akuntansi, perlakuan terhadap konstruksi dalam pengerjaan melibatkan pengungkapan informasi mengenai proyek konstruksi yang sedang dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi, dan kemudian, pemindahan konstruksi dalam pengerjaan ke dalam kategori aset tetap yang bersangkutan setelah proyek selesai.

9. PSAP Nomor 09 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban diakui ketika kemungkinan besar terdapat pengeluaran sumber daya ekonomi yang akan dilakukan atau telah dilakukan untuk memenuhi atau menyelesaikan kewajiban yang ada pada saat itu, dan perubahan pada kewajiban tersebut memiliki nilai penyelesaian yang dapat diukur secara dapat diandalkan.

Dalam proses akuntansi, perlakuan terhadap kewajiban melibatkan pencatatan kewajiban sebesar nilai nominal dan pengakuan kewajiban pada saat kewajiban tersebut muncul.

10. PSAP Nomor 10 Koreksi Kesalahan

Koreksi merujuk pada tindakan perbaikan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pos-pos yang tercantum dalam laporan sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Pembedulan kesalahan yang tidak berulang, baik yang memengaruhi posisi kas atau tidak, yang terjadi dalam periode berjalan, dilakukan melalui koreksi pada akun yang bersangkutan selama periode tersebut. Jika kesalahan yang tidak berulang terjadi dalam periode sebelumnya dan memengaruhi posisi kas atau tidak, pembedulan dilakukan pada akun yang bersangkutan selama periode berjalan. Perlakuan terhadap koreksi kesalahan melibatkan penyesuaian pada pos-pos neraca terkait selama periode di mana kesalahan ditemukan, sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

11. PSAP Nomor 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan Keuangan Konsolidasian melibatkan beberapa elemen, termasuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAI, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian laporan keuangan konsolidasian ini merujuk pada laporan keuangan yang menyatukan informasi keuangan dari seluruh entitas akuntansi yang terkait dengan pemerintah daerah.

12. PSAP Nomor 12 Laporan Operasional

Laporan Operasional memberikan gambaran ringkas tentang pengelolaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Komponen-

komponen utama dalam Laporan Operasional melibatkan pendapatan, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Fokus penyajian laporan operasional adalah memberikan gambaran singkat tentang sumber daya ekonomi yang berkontribusi pada ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah.

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 1 ayat (1), Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses integral yang secara berkesinambungan dilakukan oleh pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Proses ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan terhadap aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan Internal mencakup berbagai kegiatan seperti audit, review, evaluasi, pemantauan, dan tindakan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan dari pengawasan internal adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, dengan fokus pada pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik sesuai arahan pimpinan (Afiah & Azwari, 2015).

Pengawasan Internal Pemerintah dilakukan secara menyeluruh oleh BPKP, Inspektorat Pemerintah, dan pimpinan lembaga. Hal ini dilakukan secara independen dan obyektif terhadap semua unit di lingkungan pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah. Kegiatan pengawasan internal mencakup proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Gunanya mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan adalah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota diharuskan melakukan pengendalian terhadap jalannya kegiatan pemerintahan. Dalam pelaksanaan pengendalian ini, mereka mengacu pada Standar Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.2.3 Komponen Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, komponen sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan dan menjaga lingkungan pengendalian yang mendorong perilaku positif dan kondusif dalam penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan kerjanya.

Hal ini dapat dicapai melalui langkah-langkah berikut:

- a) Menegakkan integritas dan nilai etika.

- b) Memiliki komitmen terhadap kompetensi.
- c) Menyediakan kepemimpinan yang kondusif.
- d) Membentuk struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e) Melakukan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f) Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat terkait pembinaan sumber daya manusia.
- g) Mewujudkan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- h) Menjalin hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Lingkungan pengendalian pada sistem pengendalian internal diimplementasikan dengan menerapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) secara tertulis.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian risiko, yang melibatkan identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam proses penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan:

- a) Tujuan dari instansi pemerintah.
- b) Tujuan pada tingkat kegiatan, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan.
- c) Identifikasi risiko.
- d) Analisis risiko.
- e) Pengelolaan risiko selama periode perubahan.

Penilaian risiko pada sistem pengendalian internal dijalankan dengan menerapkan penentuan batas dan penetapan toleransi terhadap penilaian risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengorganisir kegiatan pengendalian yang sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas serta fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Pelaksanaan kegiatan pengendalian minimal memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Kegiatan pengendalian difokuskan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah.
- b) Kegiatan pengendalian terkait dengan proses penilaian risiko.
- c) kegiatan pengendalian disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah.
- d) Kebijakan dan prosedur diatur secara tertulis.
- e) Prosedur yang sudah ditetapkan harus diimplementasikan sesuai dengan ketentuan tertulis.
- f) Evaluasi teratur dilakukan terhadap kegiatan pengendalian untuk memastikan keberlanjutan dan kinerja sesuai harapan.

Pelaksanaan kegiatan pengendalian pada sistem pengendalian internal melibatkan penerapan kontrol internal dan manajemen risiko kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan informasi dalam format dan waktu yang tepat. Komunikasi informasi harus dilakukan secara efektif. Untuk menjalankan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah minimal harus:

- a) Menyediakan dan menggunakan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.

- b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara berkelanjutan.
- c) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem komunikasi secara berkelanjutan.

Pengelolaan informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal melibatkan penerapan sistem informasi untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan.

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap Sistem Pengendalian Internal. Pemantauan ini dilakukan melalui:

- a) Pemantauan berkelanjutan Melibatkan kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
- b) Evaluasi terpisah Melibatkan penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.
- c) Penyelesaian audit/tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Pemantauan terhadap pengendalian intern dilakukan melalui implementasi sistem akuntansi yang memungkinkan audit dan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi tanpa pemberitahuan sebelumnya.

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah atribut dasar individu yang berhubungan dengan seberapa efektif mereka dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Dalam istilah sederhana, kompetensi merupakan karakteristik individu yang memiliki dampak langsung terhadap sejauh mana mereka memenuhi standar kinerja yang ditetapkan dalam konteks tempat kerja atau situasi tertentu (Spencer, 1993:9). Secara paralel, Skorková (2016) menggambarkan kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas-tugas khusus, seperti tingkat kualitas, keterampilan, dan kapasitas untuk melakukan tugas dengan kompeten. Ini mengartikan bahwa kompetensi sebagai kemampuan yang dimiliki individu, kompetensi memungkinkan seseorang untuk memenuhi persyaratan pekerjaan di dalam suatu organisasi, sehingga membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kompetensi mempengaruhi seberapa efektif mereka dalam menjalankan pekerjaan mereka. Ini merupakan karakteristik dasar individu yang memiliki dampak yang dapat dihubungkan secara sebab-akibat dengan standar prestasi yang digunakan untuk mengukur kinerja yang efektif atau unggul dalam situasi pekerjaan tertentu. Menurut beberapa ahli, kompetensi adalah faktor yang menjadi dasar pencapaian tingkat kinerja yang tinggi dalam pekerjaan. Kekurangan pengetahuan yang memadai, misalnya, dapat menghambat kemajuan pekerjaan dan mengakibatkan pemborosan sumber daya seperti bahan, waktu, dan tenaga. Arti sebenarnya dari kompetensi mencakup aspek-aspek pribadi yang melekat pada

individu, dengan perilaku yang dapat diprediksi dan konsisten dalam berbagai konteks dan tugas pekerjaan.

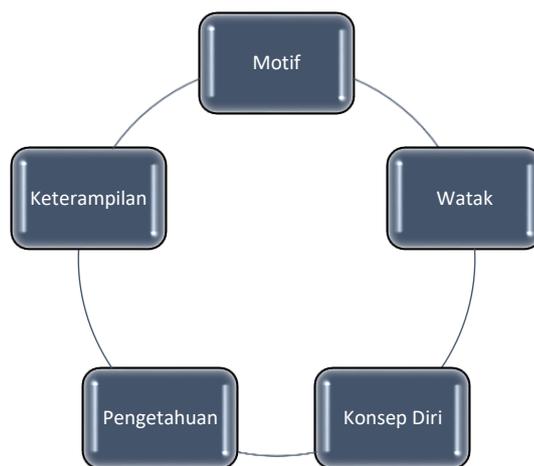
Alimbudiono & Fidelis (2004) mengutip Tjiptoherijanto (2001) yang menyatakan bahwa untuk mengukur kemampuan dan kualifikasi sumber daya manusia dalam menjalankan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat diperhatikan dari *level of responsibility* dan kualifikasi sumberdaya itu sendiri. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tercantum dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan adalah landasan untuk melakukan tugas dengan baik. Tanpa deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya itu tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Sementara itu, kualifikasi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang telah diikuti, dan dari keahlian yang ditunjukkan dalam menjalankan tugas.

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil, kompetensi sumber daya manusia didefinisikan sebagai berikut: "Kompetensi sumber daya manusia merujuk pada kombinasi kemampuan dan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, termasuk pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya". Hal ini bertujuan untuk memungkinkan Pegawai Negeri Sipil tersebut menjalankan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien."

2.1.3.2 Karakteristik Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi memiliki atribut atau fitur yang digunakan untuk memisahkan antara individu yang mencapai kinerja tinggi dengan mereka yang berada pada kinerja yang standar atau yang menunjukkan perilaku yang efektif dari yang tidak

efektif. Karakteristik kompetensi ini memiliki dampak penting dalam konteks organisasi, karena dapat mendukung berbagai aspek, termasuk proses rekrutmen, seleksi, penetapan kompensasi, pengembangan sumber daya manusia, dan penilaian kinerja.



Sumber: Diolah oleh penulis

Gambar 2.1 **Karakteristik Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sejalan dengan gagasan dan gambar di atas, keberhasilan berkelanjutan organisasi dalam mencapai visi dan misinya sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Menurut Moehariono (2014:14) kompetensi terdiri dari 5 (Lima) Karakteristik yaitu:

1. Motif, Motivasi adalah faktor pendorong yang mengarahkan dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu, sambil menjauhkan dari yang lain.
2. Watak (*Traits*), Ciri-ciri kepribadian adalah karakteristik bawaan yang memengaruhi bagaimana seseorang berperilaku dan merespons berbagai situasi. Ciri-ciri ini mencakup sifat-sifat seperti rasa percaya diri, kendali diri, ketahanan, dan daya tahan.

3. Konsep Diri (*Self Concept*), Citra diri mengacu pada sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Hal ini melibatkan penilaian terhadap nilai dan sikap seseorang melalui survei atau penilaian untuk menentukan nilai-nilai yang dimiliki dan apa yang memotivasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas tertentu.
4. Pengetahuan (*Knowledge*), Pengetahuan mewakili informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang atau area tertentu. Ini adalah kompetensi yang kompleks yang mencakup berbagai fakta dan informasi.
5. Keterampilan (*Skill*), Keterampilan melibatkan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental. Memahami tingkat kompetensi seseorang membantu dalam perencanaan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan hasil yang lebih baik.

Pada dasarnya kemampuan individu untuk ingin lebih maju dan berkembang itu semua datangnya dari kemauan dan keinginan individu untuk banyak belajar, menggali semua potensi yang ada dalam diri sendiri dan yang terutama adalah pengembangan diri lewat peningkatan ilmu pengetahuan.

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAP 01 mengenai Penyajian Laporan Keuangan, disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah adalah dokumentasi informasi yang terstruktur dan sistematis mengenai situasi keuangan, realisasi anggaran, sisa anggaran, arus kas, hasil operasional, dan perubahan ekuitas yang dicatat oleh suatu entitas selama periode tertentu. Setiap entitas memiliki tanggung jawab untuk

menyajikan secara teratur dan terstruktur semua aktivitas serta pencapaian yang telah dilakukan selama pelaksanaan program dalam suatu periode. Hal ini dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan dengan tujuan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan dapat difungsikan sebagai alat untuk menilai pertanggungjawaban, keterbukaan, serta sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.4.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah standar evaluatif yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi agar mencapai tujuannya. Terdapat empat karakteristik utama sebagai prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah memenuhi kualitas yang diharapkan:

1. Relevan (*Relevance*)

Laporan keuangan dianggap relevan jika informasinya dapat memengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini.

Aspek-aspek relevansi mencakup:

- a) Manfaat umpan balik (*Feedback Value*): Informasi memberikan peluang kepada pengguna untuk mengonfirmasi atau mengoreksi harapan mereka dari masa lalu.
- b) Manfaat prediktif (*Predictive Value*): Informasi membantu pengguna dalam meramalkan masa depan berdasarkan hasil masa lalu dan peristiwa saat ini.

- c) Tepat waktu (*Timeliness*): Informasi disajikan dalam waktu yang tepat, sehingga dapat berdampak dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan.
- d) Lengkap (*Complete*): Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan sekomprensif mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, dengan memperhatikan batasan yang ada. Informasi yang menjadi dasar setiap butir informasi utama dalam laporan keuangan dijelaskan dengan jelas agar kesalahan dalam penggunaan informasi dapat dihindari.

2. Andal (*Reliable*)

Informasi dalam laporan keuangan dianggap dapat dipercaya jika bebas dari interpretasi yang menyesatkan dan kesalahan material. Kualitas keandalan informasi terpenuhi melalui:

- a) Penyajian Jujur (*Representational Faithfulness*): Informasi mencerminkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau dapat diharapkan secara wajar untuk disajikan.
- b) Dapat Diverifikasi (*Verifiability*): Informasi yang tercantum dalam laporan keuangan dapat diuji, dan jika pengujian dilakukan oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.
- c) Netralitas (*Neutral*): Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak bersifat memihak pada kepentingan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan (*Comporable*)

Informasi dalam laporan keuangan menjadi lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari periode sebelumnya atau dengan

laporan keuangan dari periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain secara umum.

4. Dapat Dipahami (*Understandable*)

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dimengerti dengan baik jika disajikan dalam format dan terminologi yang disesuaikan dengan pemahaman para pengguna. Asumsi diambil bahwa para pengguna memiliki pengetahuan tentang operasi entitas pelaporan.

2.1.4.3 Unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Unsur laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran adalah jenis laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, termasuk alokasi dan penggunaannya. Laporan ini memperlihatkan perbandingan antara anggaran dan pelaksanaannya selama satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran menyajikan informasi tentang pertumbuhan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas.
4. Laporan Operasional memberikan ikhtisar mengenai sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas memberikan informasi terkait dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan ini mencakup saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai pertumbuhan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup penjelasan naratif atau rincian yang berkaitan dengan angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

2.2 Kajian Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merujuk kepada penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Sasmita Atika Sari Harahap, Taufeni Taufik dan Nurazlina (2020) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai). Hasil penelitian tersebut mengungkapkan Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran dan Pencatatan Administrasi tidak berpengaruh terhadap tingkat Penyerapan Anggaran.

2. Intan Puspitarini, Amrie Firmansyah dan Dian Handayani (2017) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pengelolaan Barang Milik Negara. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan Kompetensi SDM berpengaruh terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akruaI pada BMN dan Teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akruaI pada BMN.
3. Ni Putu Jesica Prastiwi dan Ni Putu Sri Harta Mima (2018) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Kualitas Laporan Keuangan. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber daya Manusia dan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI berpengaruh sangat baik terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
4. Intan Puspitarini, Amrie Firmansyah dan Dian Handayani (2017) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pengelolaan Barang Milik Negara. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan berpengaruh positif terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pengelolaan Barang Milik Negara.
5. Indra Firmansyah (2018) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI terhadap Relevansi Laporan Keuangan.

Hasil penelitian tersebut mengungkapkan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI berpengaruh signifikan terhadap Relevansi Laporan Keuangan.

6. Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman (2017) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAP dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY.
7. Dhedy Triwardana (2017) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan Penerapan SAP, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD.
8. Rasyidah Nadir dan Hasyim (2017) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI (Studi Empiris di PEMDA Kabupaten Barru). Hasil penelitian tersebut mengungkapkan Pemanfaat Teknologi berpengaruh signifikan terhadap dan

Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Baru.

9. Adrian Farros Elfauzi dan Sudarno (2019) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Demak). Hasil penelitian tersebut mengungkapkan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Internal Audit berpengaruh signifikan dan Penerapan SAP berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
10. Siska Marini Pilander dkk (2018) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kotamobagu. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan Penerapan SAP, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
11. Nyoman Triyadi Agustiawan dan Ni Ketut Rasmini (2016) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Sistem Berbasis Akrua, Ti, Dan Spip Pada Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sdm Sebagai Moderasi. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

12. Rita Dwi Putri (2022) melakukan penelitian yang berjudul *Reviu Laporan Keuangan Dan penerapan Sap berbasis akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan *Reviu Laporan Keuangan dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*, secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
13. Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013) melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)*. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan *Penggunaan standar akuntansi pemerintahan serta kualifikasi pegawai di pemerintahan daerah memiliki dampak signifikan terhadap mutu laporan keuangan yang dihasilkan*.
14. Wiwi Idawati dan Lia Eleonora (2020) melakukan penelitian yang berjudul *Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Keuangan Dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan*. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan *sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi dan akuntabilitas keuangan mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah*.
15. Desiana Anugrah Budiawan dan Budi S. Purnomo (2014) melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan *Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh*

positif, sedangkan kekuatan koersif berpengaruh positif pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

16. Novtania Mokoginta dkk (2017) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan Penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern berpengaruh negatif, sedangkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
17. M Ali Fikri dkk (2015) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan pemerintahan penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran internal audit memiliki berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
18. Dini Lestari dan Sri Rahayu (2020) melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (Sap) Berbasis AkruaL Dalam Pengambilan Keputusan Internal Dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan Secara parsial penerapan SAP berbasis akruaL berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan internal dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
19. Novita Fitriyani dan Helmi Herawati (2019) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). Hasil penelitian tersebut mengungkapkan Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

20. Dorotea Yovita Putri Herinda dan Firma Sulistiyowati (2023) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua, Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah, Dan *Good Public Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Skpd Dan Opd Kabupaten Sleman). Hasil penelitian tersebut mengungkapkan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Informasi Akuntansi dan *Good Public Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas penulis memahami dan mendalami maksud dan tujuan serta saran yang diberikan oleh penelitian terdahulu. Di bawah ini diuraikan mengenai persamaan dan perbedaan yang sudah dilakukan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang dapat dijadikan pemulis sebagai acuan seta landasan dalam kaitanya dengan judul yang diteliti.

Untuk lebih jelasnya terkait orisinalitas penelitian, disajikan pada tabel dibawah mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian sebagai berikut, yang bisa dilihat pada halaman selanjutnya.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sasmita Atika Sari Harahap, Taufeni Taufik, dan Nurazlina (2020)	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia Metode: Kuantitatif Alat analisis: Regresi Linear Berganda	Variabel Independen: Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi Variabel Dependen: Tingkat Penyerapan Anggaran	Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran dan Pencatatan Administrasi tidak berpengaruh terhadap tingkat Penyerapan Anggaran.	Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 13, No. 1, Mei 2020, 1-10 e- ISSN: 2476-9460 p- ISSN: 2085-0751
2.	Intan Puspitarini, Amrie Firmansyah, dan Dian Handayani (2017)	Variabel Independen: Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Variabel Independen: Teknologi Informasi Variabel Dependen: Penerapan Akuntansi Berbasis Akural Pada Pengelolaan Barang Milik Negara	Kompetensi SDM berpengaruh terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akural pada BMN dan Teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada BMN.	JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING Vol. 1, No. 2, 2017, 141-149 ISSN: 2548-9917
3.	Ni Putu Jesica Prastiwi, Ni Putu Sri Harta Mima (2018)	Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal dan	Variabel Independen: Penerapan Akuntansi	Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber daya	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.25.

	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Berbasis Akrua	Manusia dan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua	2 November (2018): 1178-1204 ISSN: 2302-8556
	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Alat Analisis: Regresi Logistik	berpengaruh sangat baik terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	
4.	Intan Puspitarini, Amrie Firmansyah, Dian Handayani (2017)	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Variabel Independen: Komitmen Pimpinan Variabel Dependen: Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pengelolaan Barang Milik Negara	Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan berpengaruh positif terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pengelolaan Barang Milik Negara. Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice Bandung, 20 Juli 2017 ISSN- 2252-3936
5.	Indra Firmansyah (2018)	Variabel Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Metode: Kuantitatif	Variabel Dependen: Relevansi Laporan Keuangan	Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua berpengaruh signifikan terhadap Relevansi Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi TH X / 02 / Agustus / 2018 ISSN: 1979 - 8334
6.	Putriasri Pujanira, Abdullah Taman (2017)	Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Variabel Independen: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Alat Analisis: Regresi Sedehrhana	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAP dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. JURNAL NOMINAL / VOLUME VI NOMOR 2 / TAHUN 2017

7.	Dhedy Triwardana (2017)	Variabel Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Variabel Independen: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Penerapan SAP, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD.	JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017
8.	Rasyidah Nadir, Hasyim (2017)	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia	Variabel Independen: Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	Pemanfaat Teknologi berpengaruh signifikan terhadap dan Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Baru	Journal.feb unil.ac.id (AKUNTANBE L) Volume 14, No 1 2017 ISSN Print: 0216-7743 ISSN Online: 2528-1135
9.	Adrian Farros Elfauzi, Sudarno (2019)	Variabel Independen: Penerapan Akuntansi	Variabel Independen: Peran Internal Audit	Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Internal Audit	ejournal-sl. undip Volume 8 Nomor 2 Tahun

		Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan		berpengaruh signifikan dan Penerapan SAP berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	2019, Halaman 1-9 ISSN (Online): 2337-3806
		Metode: Kuantitatif			
		Alat Analisis: Regresi Linear Berganda			
10..	Siska Marini Pilander dkk (2018)	Variabel independen: Penerapan standar akuntansi pemerintahan Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel dependen: kualitas laporan keuangan pemerintah	Variabel Independen: Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penerapan SAP, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill" Vol 9, No 2, (2018) P-ISSN: 2088-8899 E-ISSN: 2715-1859

11.	Nyoman Triyadi Agustiawan, Ni Ketut Rasmini (2016)	Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Penerapan Akuntansi Akrual dan Teknologi Informasi, Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi SDM sebagai Moderasi Alat Analisis: <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.	E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.10 (2016): 3475-3500 ISSN: 2337-3067
12.	Rita Dwi Putri (2022)	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Variabel Independen: Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual dan Reviu Laporan	Mengungkapkan Reviu Laporan Keuangan dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.2 No.1 Juni 2022 ISSN 2798-3471 (Cetak) eISSN 2798-3641 (Online)
13.	Daniel Kartika Adhi & Yohanes Suhardjo (2013).	Variabel Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Variabel Dependen: KLIK	Variabel Independen: Kualitas Aparatur Pemerintah	Penggunaan standar akuntansi pemerintahan serta kualifikasi pegawai di pemerintahan daerah memiliki dampak signifikan terhadap mutu laporan keuangan yang dihasilkan.	Jurnal STIE Semarang Vol 5, No 3, edisi Oktober (2013) ISSN: 2252-7826

14.	Wiwi Idawati & Lia Eleonora (2020)	Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Independen: Akuntabilitas Keuangan	Sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi dan akuntabilitas keuangan mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah.	Equity Vol 22, No 2, 153-172 (2020) P-ISSN: 0216-8545 E-ISSN: 2684-9739
15.	Desiana Anugrah Budiawan & Budi S. Purnomo (2014).	Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Independen: Kekuatan Koersif	Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif, sedangkan kekuatan koersif berpengaruh positif pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol 2, No 1, (2014), 276-288
16.	Novtania Mokoginta dkk (2017).	Variabel Independen: Sistem pengendalian intern Variabel dependen: Kualitas laporan keuangan pemerintah	Variabel Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern berpengaruh negatif, sedangkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 12, No 2, 874-890 (2017)
17.	M Ali Fikri dkk (2015).	Variabel Independen: Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern	Variabel Independen: Kompetensi aparatur dan peran audit internal.	Penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran internal audit memiliki berpengaruh tidak signifikan terhadap	Jurnal Ilmu Akuntansi. (Akuntabilitas) Vol 9, No 1 (2015)

		Variabel dependen: kualitas laporan keuangan		kualitas informasi laporan keuangan.	
18.	Dini Lestari, Sri Rahayu (2020)	Variabel Dependen: Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua	Secara parsial penerapan SAP berbasis akrua berpengaruh signifikan terhadap keputusan internal dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia Volum e3, No.2, April 2020 P-ISSN: 2598-5035; E-ISSN: 2684-8244
19.	Novita Fitriyani, Helmi Herawati (2019)	Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal	Variabel Independen: Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua dan Kualitas Laporan Keuangan	Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Jurnal Akuntansi Unihaz-JAZ Desember 2019 JAZ – ISSN 2620 – 8555 – Vol.1 No.2
20.	Dorotea Yovita Putri Herinda, Firma Sulistiyowati (2023)	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Linear Berganda	Variabel Independen: Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah, Good Public Governance	Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Informasi Akuntansi dan Good Public Governance berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS (JMB) Volume 23 Nomor 2, September 2023 p-ISSN: 1412-0593 e-ISSN: 2685-7294

Raden Aby Zaldivya (2024) 203403078

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya

Sumber: Diolah oleh penulis

2.3 Kerangka Pemikiran

Lembaga pemerintah memiliki peran sentral dalam membentuk kebijakan yang berdampak pada arah pembangunan bangsa Indonesia. Mengarahkan kondisi masyarakat Indonesia ke tingkat yang lebih baik merupakan tujuan utama dalam pembangunan daerah. Rencana untuk mencapai tujuan ini dirancang melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pembiayaan rencana pembangunan daerah. Proses ini menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian diresmikan melalui keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Keseluruhan langkah ini merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah yang akhirnya dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan dengan tujuan memberikan informasi yang dibutuhkan. Secara umum, laporan keuangan dapat difungsikan sebagai alat untuk menilai pertanggungjawaban, keterbukaan, serta sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan adalah standar evaluatif yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi agar mencapai tujuannya. Terdapat empat karakteristik utama sebagai prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah memenuhi kualitas yang diharapkan yaitu: Relevan (*Relevance*), Andal (*Reliable*), Dapat Dibandingkan (*Comporable*), Dapat Dipahami (*Understandable*).

Istilah *good governance* pertama kali digunakan pada *World Development Report* (1989) yang mengacu pada penyelenggaraan pemerintah yang amanah dan bertanggung jawab, tata kelola pemerintahan yang baik serta pemerintahan yang bersih. *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *World Bank* mendefinisikan *governance* pada sektor publik sebagai cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) menekankan definisi *governance* pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara.

Teori *good governance* didukung dengan penelitian yang dilakukan masnun (2018) menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya publik.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan melibatkan pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah yang sangat penting guna mencapai pengukuran kinerja yang lebih optimal. Hal ini juga bertujuan untuk mempermudah manajemen keuangan/aset dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Menurut Pasal 1 ayat 3 dari PP Nomor 71 Tahun 2010, dapat dijelaskan bahwa standar akuntansi pemerintah mencakup prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Apabila didasarkan dan dikaitkan dengan teori *good governance* yang didukung dengan penelitian yang dilakukan Mardiasmo (2018) Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki tujuan untuk memandu penyajian laporan keuangan secara umum, dengan fokus untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan cara meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan.

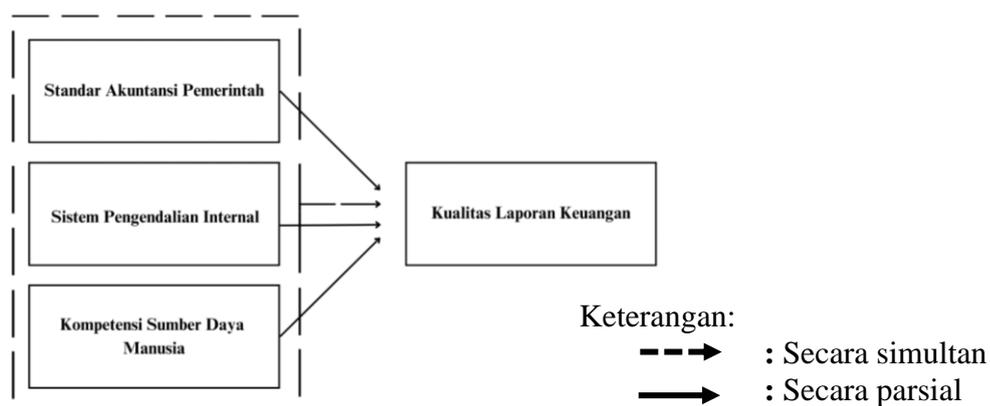
Selanjutnya Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 1 ayat (1), Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses integral yang secara berkesinambungan dilakukan oleh pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Proses ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan terhadap aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan Internal mencakup berbagai kegiatan seperti audit, review, evaluasi, pemantauan, dan tindakan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Peran teori *governance* didukung dengan penelitian Kesuma, Puji, Desmaria, Dkk. (2017) Sistem Pengendalian Internal merupakan garis pertahanan utama dalam mengatasi potensi ketidaksahan data dan informasi dalam penyusunan Laporan Keuangan. Keberadaan sistem pengendalian intern yang efektif akan memastikan kinerja optimal organisasi, termasuk dalam proses penyajian laporan keuangan, dan sistem yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi.

Selain itu, kompetensi sumber daya manusia didefinisikan sebagai berikut: “Kompetensi sumber daya manusia merujuk pada kombinasi kemampuan dan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, termasuk pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya”. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan Pegawai Negeri Sipil tersebut menjalankan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.”

Peran teori *governance* dan didukung dengan penelitian yang dilakukan Nurillah (2014) dan Ihsanti (2014) Kompetensi Sumber Daya Manusia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam tindakan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pengembangan kompetensi dapat melibatkan peningkatan pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan memiliki kemampuan dan motivasi untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien, organisasi dapat berhasil mencapai tujuannya.

Mengacu pada uraian pemikiran di atas, berikut adalah kerangka pemikiran yang disajikan dalam penelitian ini:



Sumber: Diolah oleh penulis

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan tujuan masalah, identifikasi masalah, dan uraian dalam kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

- H₁: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.
- H₂: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.
- H₃: Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.
- H₄: Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.